



PEMERINTAH KOTA BIMA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

INSPEKTORAT KOTA BIMA

TAHUN ANGGARAN 2021



TAHUN 2022

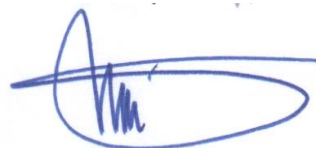
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Bima disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Bima ini untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kota Bima tahun anggaran 2021 kepada pihak yang berkepentingan.

Mudah-mudahan dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini, Inspektorat Kota Bima dalam melaksanakan tugasnya di masa mendatang akan lebih terarah dan tepat sasaran

Kota Bima, Februari 2022
INSPEKTUR DAERAH KOTA BIMA,



Muhaimin, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620217 199003 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
C. ASPEK STRATEGIS	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 – 2023.....	12
B. PERJANJIAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
1. Perbandingan Antara Target dan Relisasi Kinerja Tahun Ini.	28
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	35
3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra.	42
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.....	50
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	65
6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	69
B. REALISASI ANGGARAN	75
BAB IV PENUTUP	78
A. KESIMPULAN	78
B. SARAN	79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bagan Organisasi Inspektorat Kota Bima
Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2018-2023
Penetapan Kinerja Tahun 2021
Rencana Kinerja Tahun 2021
Pengukuran Kinerja Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bima, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan laporan tersebut yang menggambarkan kinerja Inspektorat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun yang menjadi dasar hukumnya sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima:

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima adalah:

1. Tugas

Inspektorat Kota Bima mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah.

2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah
- d. Pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur organisasi Inspektorat Kota Bima per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Inspektur

2. Sekretaris

- a. Kepala Sub Bagian Umum,Keuangan dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan

3. Inspektur Pembantu Wilayah I

4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Investigasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

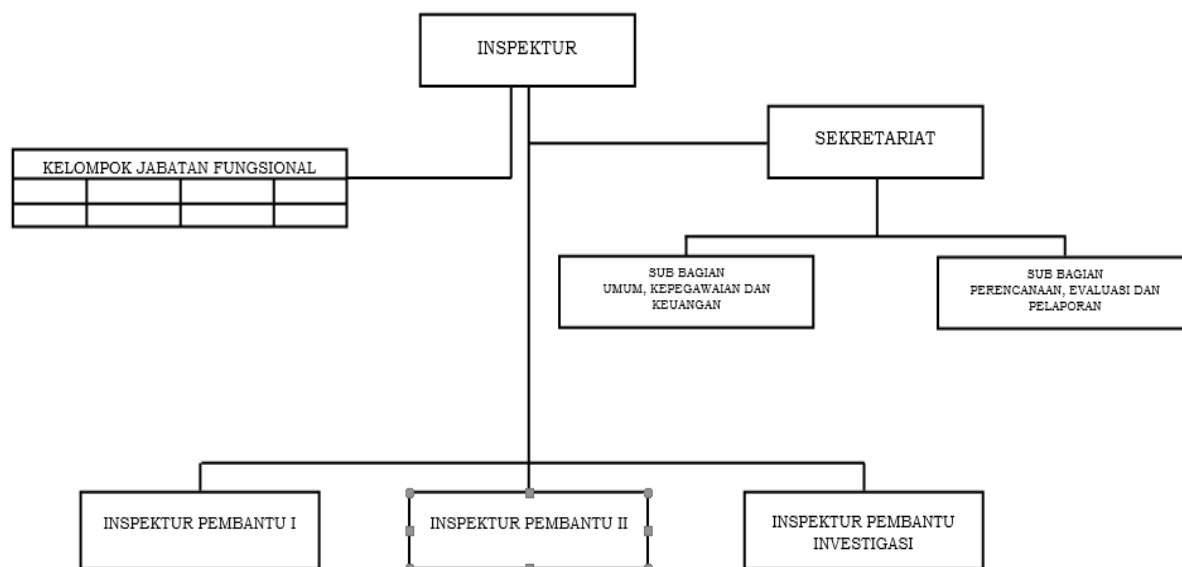
Inspektorat Kota Bima mulai melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan angka kreditnya serta Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BAKN Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional P2UPD dan angka kreditnya maka ada 2 kelompok jabatan fungsional di Inspektorat

- a. Jabatan Fungsional Auditor
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bima Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2020

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT



3. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kota Bima per Desember 2021 berjumlah 53 personil, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Menurut Jabatan/Eselon

- Inspektur /Iib : 1 orang
- Sekretaris/IIIa : 1 orang
- Inspektur Pembantu/IIIa : 3 orang
- Kepala Sub Bagian/IVa : 2 orang
- Pejabat Fungsional : 33 orang
- Staf : 16 orang

2. Menurut Tingkat Pendidikan :

- S 3 : 0 orang
- S 2 : 9 orang
- S 1 : 40 orang
- D 3/Sarjana Muda : 0 orang
- SLTA : 6 orang
- SMP : 0 orang

3. Menurut Golongan/Ruang

- Golongan IV/c : 1 orang
- Golongan IV/b : 2 orang

- Golongan IV/a : 4 orang
- Golongan III/d : 12 orang
- Golongan III/c : 22 orang
- Golongan III/b : 8 orang
- Golongan III/a : 1 orang
- Golongan II/d : 0 orang
- Golongan II/c : 0 orang
- Golongan II/b : 5 orang
- Golongan II/a : 0 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM di Inspektorat Kota Bima Belum cukup menunjang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Adapun komposisi pegawai berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, tergambar sebagai berikut :

Tabel 1
Keadaan SDM Inspektorat Kota Bima
Per Desember 2021

No	Eselon	Gol/Ruang (orang)					Tingkat Pendidikan						
		IV	III	II	I	Non Gol.	SD	SMP	SMA	D3/SM	S1	S2	S3
1.	II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2.	III	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
3.	IV	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
4.	Fungsional	2	31	-	-	-	-	-	-	-	30	3	-
5.	Staf	-	11	5	-	-	-	-	6	-	7	3	-
JUMLAH		6	44	5	-	-	-	-	6	-	41	8	-

4. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Inspektorat Kota Bima memerlukan prasarana pendukung. Sampai saat ini Inspektorat Kota Bima belum memiliki gedung kantor sendiri dan menempati eks Kantor Walikota Bima di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2 Kota Bima.

Sarana digunakan untuk pendukung kegiatan operasional Inspektorat. Adapun sarana dan prasara yang dimiliki Inspektorat Kota Bima antara lain:

- a. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
- b. Fasilitas komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet dan mesin faksimili;
- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis pengawasan, dilengkapi dengan ketersediaan printer,
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital dan LCD proyektor;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemaries, air conditioner (AC), dispenser, kipas angin dan televisi;
- f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

5. PENGANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2021 Inspektorat Kota Bima didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 sebesar Rp. 7.399.431.556,00,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 7.341.721.190,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratur Sembilan Puluh Rupiah), atau 99,22%. (Sembilan Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Dua Persen).

Berikut disajikan data realisasi anggaran pada Inspektorat Kota Bima tahun 2013-2018.

C. ASPEK STRATEGIS.

Pengawasan (*controlling*) adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai kebijaksanaan, program dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya menjadi tanggung jawab pimpinan / manajer pada tingkat manapun. Hakekatnya Pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya pemborosan, penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Demikian halnya dengan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bima, untuk dapat mencapai tujuan dan tugas-tugas bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka fungsi Pengawasan menjadi sangat penting. Fungsi ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bima.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); menekankan pentingnya pengawasan yang penjabarannya antara lain diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- Inspektorat Kota Bima mempunyai kompetensi pengawasan atas semua *obyek pemeriksaan* yang ada di wilayah Pemerintah Kota Bima, kecuali yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

- Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan / atau diminta oleh Inspektorat Kabupaten/Kota berdasarkan sinergi pengawasan.
- Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi dibidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara.

Dalam menghadapi era globalisasi dan otonomi daerah kita perlu merencanakan strategi yang komprehensif. Untuk itu Inspektorat menyikapi dengan menghimpun data-data yang berpengaruh terhadap keberadaan lembaga pengawasan pada masa yang akan datang meliputi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*).

Berdasarkan analisis terhadap kondisi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja Inspektorat Kota Bima dapat disampaikan beberapa aspek seperti terurai dalam matriks berikut:

Tabel 3:

Isu strategis dan Permasalahan utama Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Bima

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi	
			Internal	Eksternal
1	2	3	4	5
Efektifitas dampak pemeriksaan	Masih Belum Efektif, terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan setiap hasil pemeriksaan	Semakin rendahnya jumlah temuan Pemeriksaan	Keterbatasan anggaran yang berpengaruh terhadap lama Waktu Pemeriksaan	Komitmen kepala OPD untuk TL Temuan pemeriksaan Dan masih rendahnya Penerapan SPIP Di intrn OPD
Kualitas Auditor	Sebagian Besar Aparat Pengawas Pemerintah Daerah masih berada dalam level 1 (Initial) dan 2 (Infrastructure)	Kondisi saat ini Seharusnya kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah sudah berada pada level 3 (Integrated) atau level 4(Managed) atau 5(Optimized)		Terbatasnya penyelenggaraan Bintek-Bintek yang berkaitan dengan pengawasan
Kuantitas	Hanya ada 10 orang	Seharusnya	Keterbatasan	Pendidikan JFA yang

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi	
			Internal	Eksternal
1	2	3	4	5
Auditor	auditor, dan hanya 9 P2UPD	Inspektorat Kota Bima memiliki 40 Orang Auditor dan 30 P2UPD	Formasi untuk Rekrutmen tenaga Auditor	penyelenggaraannya masih sangat terbatas
Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan	Kualitas LHP belum memenuhi standar pemeriksaan dan Masih kurangnya tenaga fungsional Auditor yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi JFA	LHP yang sesuai dengan standar Pemeriksaan	Keterbatasan program Peningkatan kapasitas Mandiri (PKM)	Belum pernah dilaksanakannya Bintek Penulisan LHP yang Efektif.

Uraian dalam matriks diatas menunjukkan bahwa tingginya temuan pemeriksaan sangat bergantung pada komitmen pimpinan OPD yang menjadi auditi disamping ketersediaan tenaga yang berkualitas dan profesional mendorong terwujudnya pengawasan yang efektif. Beberapa hal ini yang menjadi fokus Inspektorat Kota Bima dalam mencapai visi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 – 2023

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Bima telah menyusun rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2018 – 2023 tentunya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun salah satu misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan indikator pemerintah daerah yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima sekaligus sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan organisasi Inspektorat Kota Bima sebagai berikut :

1. Misi ke 3 (tiga) Pemerintah Kota Bima : ***Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik..***
2. Sasaran strategis Pemerintah Kota Bima : ***Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah***
3. Arah Kebijakan Pemerintah Kota Bima :
 - a. ***Peningkatan kualitas penilaian kinerja dan pelaporan***
 - b. ***Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah***
4. Indikator Kinerja Pemerintah Kota Bima :
 - a. ***Opini BPK terhadap LKPD***

Untuk mendukung tercapainya RPJMD sebagaimana tersebut diatas maka rencana strategik Inspektorat Kota Bima yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2021 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021.

1. Visi

Dalam Keppres Nomor 7 Tahun 1999 dinyatakan bahwa visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran sebuah organisasi yang diinginkan di masa depan.

Visi juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023.

Sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan Inspektorat Kota Bima dituntut untuk dapat menetapkan visi sebagai bagian dari rencana strategik organisasi. Visi senantiasa diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi menuju keadaan yang diharapkan.

Visi Inspektorat Kota Bima adalah

“Terciptanya Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi, dan Efektifitas Dalama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Profesionalisme Aparatur Inspektorat”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan maka Inspektorat Kota Bima menyusun misi dengan jelas yang akan diemban/ dilaksanakan dalam menuju tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Ada 4 (empat) misi yang ditetapkan oleh Inspektorat Kota Bima yang menjadi pegangan dalam merumuskan dan mengemban langkah selanjutnya, yaitu :

1. Meningkatkan Integritas dan Dedikasi Aparatur Inspektorat.
2. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pengawasan.
3. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bima.

Penjabaran misi selanjutnya kedalam bentuk yang lebih operasional telah dituangkan dalam pernyataan perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dengan indikator serta target yang akan dicapai pada tahun 2021 serta program kegiatan dan anggaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai langkah strategis yang selanjutnya diwujudkan dalam rencana kerja untuk mencapai target yang dijanjikan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaranstrategis instansi pemerintah.

Pada tahun 2021, Inspektorat Kota Bima telah menetapkan rencana kerja tahunan dengan mengacu kepada sasaran strategis pemerintah daerah yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima yaitu Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik Baik dengan indikator Kinerja : Opini BPK terhadap LKPD dan Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/Nilai SAKIP. Untuk menunjang tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerja pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima tersebut, maka Inspektorat Kota Bima mendukung dengan beberapa sasaran strategis tentunya ditunjang dengan program dan kegiatan yang relevan. Adapun program dan kegiatan tersebut terdiri dari 3 (tiga) Program Utama yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2021 tentu diperlukan sumber dana sebagai salah satu syarat keberhasilan suatu rencana. Dana tersebut juga merupakan salah satu unsur input yang harus dipenuhi dan mempunyai tolak ukur tersendiri. Dengan

demikian mudah dipahami bahwa dalam menyusun rencana strategik dan rencana kinerja tahunan, tidaklah terlepas dari sistem penganggaran pada organisasi Inspektorat Kota Bima.

Pada prinsipnya Perjanjian Kinerja tahun 2021 ini akan menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kota Bima selama tahun 2021. Target kinerja menggambarkan nilai kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada setiap program dan kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolak ukur keberhasilan organisasi dalam upaya mencapai misi dan visinya. Sedangkan target kinerja dalam tingkat kegiatan digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan.

Adapun ikhtisar sasaran strategis, indikator kinerja dan kuantitas capaian kinerja pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima yang hendak dilaksanakan dalam tahun 2021 yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4: Ikhtisar sasaran strategis, indikator kinerja dan kuantitas target capaian Pemerintah Kota Bima

NO	SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BIMA	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap LKPD	WTP
		2 Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/Nilai SAKIP	BB

Selanjutnya dibawah ini akan diungkapkan rincian sasaran strategis indikator kinerja, beserta program dan kegiatan Inspektorat Kota Bima yang menunjang sasaran strategis pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima :
“ Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah ”

Sasaran strategis pemerintah Kota Bima sebagaimana tersebut diatas terdiri dari 2 (dua) Indikator kinerja yang ditunjang dengan 2 (dua) sasaran strategis Inspektorat Kota Bima dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut :

Indikator Sasaran Pemerintah Kota Bima : “Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap LKPD” dan “ Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Nilai SAKIP ”

Indikator sasaran sebagaimana tersebut diatas dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan gambaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memenuhi kriteria antara lain :

- a. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP).
- b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik.
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping ketiga kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidak pastian dan kesalahan yang cukup berarti (no material uncertainties), pengelolaan atas Cash flow dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material.

Untuk mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas, maka Inspektorat kota Bima menunjang dengan sasaran strategis dan indikator kinerja pendukung sehingga

dari indikator pendukung tersebut dapat mengukur indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima, adapun sasaran strategis dan indikator kinerja pendukung dimaksud sebagai berikut :

Tabel 5: Ikhtisar sasaran strategis, indikator kinerja dan kuantitas target capaian Inspektorat Kota Bima untuk penunjang indikator kinerja Opini BPK RI dan Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/Nilai SAKIP

NO	SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material	60,98 %
		2. Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	90,00%
		3. Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	Berkembang (2,80)
		4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B	93,10%

Sasaran strategis Inspektorat Kota Bima untuk menunjang Indikator pemerintah Kota Bima terdiri dari 2 (dua) sasaran yang ditunjang dengan 7 (tujuh) Indikator kinerja dengan penjelasan masing – masing sebagai berikut :

Sasaran Strategis Inspektorat 1 : “ Meningkatkan kualitas pengawasan yang efektif dan efisien dan Akuntabel dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah “

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya untuk menunjang indikator sasaran stretegis pemerintah Kota Bima yaitu meraih opini WTP maka Inspektorat Kota Bima tentunya harus meningkatkan kualitas pengawasan secara efektif dan efisien.

Untuk mengukur pengawasan telah berjalan efektif dan efisien tentunya ditunjang dengan indikator yang relevan yaitu :

Indikator Sasaran 1.1 : “ Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material “

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif dan efisien yaitu membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar – standar yang telah ditentukan terlebih dahulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur kemuradanya, serta mengambil tindakan yang diperlukan yang menjamin pemanfaatan penuh sumberdaya yang digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan kinerja organisasi perangkat daerah sudah sesuai dengan standar, tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku maka salah indikator yang perlu diukur adalah terhadap temuan berulang dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian daerah sehingga dapat mempengaruhi akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan salah satu unsur penunjang untuk meraih opini WTP. Indikator kinerja ini ditunjang dengan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut :

Tabel 6: Program dan Kegiatan untuk penunjang indikator kinerja Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material.

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
11	12	13	14					15	16	17	18
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya temuan APIP dan BPK yang Bersifat Material	Persentase menurunnya temuan APIP dan BPK	88,24%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah	42	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (Operasional)	37
								Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1
									Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah
								Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1
									Penanganan Hasil Penyelenggaraan Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
								Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	88%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	8	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8

Indikator Sasaran 1.2 : “ Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK “

Untuk meningkatkan kualitas pengawasan yang efektif dan efisien, upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima. Semakin baik pemerintah melaksanakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan maka

semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangannya, yang ditunjukkan dengan semakin sedikitnya temuan terhadap pemeriksaan pada tahun selanjutnya. Adapun program dan kegiatan untuk menunjang indikator sasaran ini terdiri dari 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

Tabel 7: Program dan Kegiatan untuk menunjang indikator kinerja Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK.

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
11	12	13	14					15	16	17	18
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya temuan APIP dan BPK yang Bersifat Material	Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	88%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	8	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8

Indikator Sasaran 1.3 : “ Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima “

Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka memerlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai pemerintahan terutama pada satuan organisasi perangkat daerah Kota Bima, guna memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat Kota Bima melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Inspektorat Kota Bima berupaya melakukan pengawasan atas penyelenggaraan SPIP yang pada organisasi perangkat daerah Kota Bima dengan menentukan sasaran strategis yaitu Terselenggaranya Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku guna menunjang Sasaran dan indikator utama pemerintah Kota Bima.

Sebagai unsur pertama dalam SPIP, lingkungan pengendalian memegang peranan yang sangat penting karena akan menentukan keberlangsungan pelaksanaan keempat unsur lainnya. Efektivitas pengendalian intern dipengaruhi oleh kondisi dalam instansi, sehingga pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Oleh karena itu dalam menerapkan unsur SPIP tersebut, pimpinan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur, dan praktek detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan organisasi perangkat daerah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Adapun anggaran khusus program dan kegiatan untuk menunjang indikator sasaran ini belum tersedia seperti untuk pembentukan satgas SPIP, sosialisasi dan bimtek SPIP, evaluasi SPIP sehingga hanya included dalam program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 8: Program dan Kegiatan untuk penunjang indikator kinerja Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima.

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Hasil Quality Assurance Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	Level/Nilai Hasil Quality Assurance Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	Terdefinisi (3,10)	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	42	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penilaian Quality Assurance Perwakilan Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	Level/Nilai Quality Assurance Perwakilan Terhadap Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	1

Indikator Sasaran 1.4 : “ Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B “

Dengan adanya indikator ini pemerintah Kota Bima dapat mengukur sejauhmana OPD telah pertanggungjawaban kinerjanya pertahun sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi pemerintah yang merupakan salah satu pilar meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Adapun program dan kegiatan untuk menunjang indikator sasaran ini sebagai berikut:

Tabel 9: Program dan Kegiatan untuk penunjang indikator kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B.

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
PROGRAM PERUMUSAN KEBLAJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bima	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP Meningkat	29,41%	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	42	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Tersedianya Dokumen Hasil Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka memberikan gambaran tingkat capaian target kinerja dari masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra maupun rencana kerja tahun anggaran 2021 maka diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis guna mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Berikut pengukuran kinerja Inspektorat Kota Bima yang digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis pemerintah Kota Bima yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Adapun hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Bima tahun 2021 sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 pada sasaran strategis pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima yaitu meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD dan Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Nilai SAKIP.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD tahun 2018 dan Nilai SAKIP tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD tahun 2018 dan Nilai SAKIP Tahun 2021.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	
I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan yang daerah	1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	
		Keterangan : Pengukuran berdasarkan opini BPK RI atas hasil pemeriksaan LKPD Kota Bima tahun 2018 yang diaudit tahun 2021				
		2. Nilai SAKIP	B (65,58)	B (67,05)	B	
		Keterangan : Pengukuran berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima tahun 2021 oleh Kementerian PAN-RB.				

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 13 diatas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD, pengukurannya didasarkan pada capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2018, hal ini disebabkan oleh keluarnya opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI atas hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah sekitar bulan Mei setelah tahun anggaran atau tahun 2021 sehingga kinerja yang diukur adalah kinerja tahun anggaran sebelumnya dengan realisasi bersifat kualitatif yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain daripada opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Indikator Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai AKIP yang didasarkan pada hasil evaluasi oleh Kementerian PAN-RB tahun 2021 menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi hasil pada

Pemerintah Kota Bima menunjukkan hasil yang Baik yaitu B (67,05).

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Kota Bima sebagai salah satu unsur penunjangnya untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan Indek Nilai SAKIP.

Adapun beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang serta gambaran perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Inspektorat Kota Bima tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 14: Perbandingan antara target dan realisasi kinerja, dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang mendukung indikator pemerintah Kota Bima dengan Indikator opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tahun anggaran 2018 pemeriksaan Tahun 2021 dan Nilai SAKIP Tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif , efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material	60,98%	76,00%	68,29%
Keterangan :					
Prosentase target dihitung dengan rumus: jumlah OPD yang ditargetkan untuk tahun n dibagi dengan Jumlah OPD seluruhnya di kali dengan 100%					
Prosentase realisasi dihitung dengan Rumus : jumlah OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang dibagi dengan target OPD dikali 100%					
Prosentase Capaian dihitung dengan Rumus : realisasi OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang dibagi dengan jumlah total OPD dikali dengan 100%					
		2. Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	90,00%	65,63%	72,92%
Keterangan :					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
		<p>Prosentase target dihitung dengan rumus: jumlah Temuan yang ditargetkan untuk tahun N dibagi dengan Jumlah temuan tahun (-N) di kali dengan 100%</p> <p>Prosentase realisasi dihitung dengan Rumus : Jumlah Realisasi Tahun N dibagi Jumlah Target temuan Tahun N dikali 100%</p> <p>Prosentase Capaian dihitung dengan Rumus : Realisasi Tahun N dibagi dengan Target Tahun N di Kali 100%</p>			
		3. Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	berkembang (2,80)	berkembang (2,40)	85,71 %
		<p>Keterangan :</p> <p>Prosentase target dihitung dengan rumus: Ditentukan dengan rencana tingkat capaian pertahun</p> <p>Prosentase realisasi dihitung dengan Rumus : Realisasi Tahun N</p> <p>Prosentase Capaian dihitung dengan Rumus : realisasi tahun N dibagi dibagi dengan target dikali dengan 100%</p>			
		4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B	93,10%	93,10%	100,00%
		<p>Keterangan</p> <p>Porsentase target dihitung dengan rumus: jumlah OPD yang ditargetkan untuk tahun n dibagi dengan Jumlah OPD seluruhnya di kali dengan 100%</p> <p>Porsentase realisasi dihitung dengan Rumus : jumlah OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B dibagi dengan target OPD menerapkan SAKIP dikali 100%</p> <p>Porsentase Capaian dihitung dengan Rumus : realisasi OPD yang menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B dibagi dengan jumlah total OPD dikali dengan 100%</p>			

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 14 diatas menunjukkan bahwa :

- Sasaran Strategis Inspektorat meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah daerah**

- 1.1. Sasaran Strategis Inspektorat meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material menunjukkan bahwa dari OPD yang ditargetkan yang tidak mendapatkan temuan berulang sebesar 60,98% atau sebanyak 25 OPD dari total OPD sebanyak 41 OPD. Dari target tersebut maka terealisasi sebanyak 28 OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang atau sebesar 76,00% atau dengan capaian sebesar 68,29 % hal tersebut menunjukkan tercapainya target yang diinginkan.
- 1.2. Sasaran Strategis Inspektorat meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK. Target sebesar 90,00% atau sebanyak 32 Temuan dari Total temuan tahun 2018 sebagai base line data sebanyak 34. Dari target tersebut tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK Terealisasi sebanyak 21 temuan atau 65.63% dari target 32 temuan atau dengan capain sebesar 88,93% dari target yang ditentukan sebesar 90,00% atau belum tercapainya target yang diinginkan.
- 1.3 Sasaran Strategis Inspektorat meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima. Dari Target Level/Nilai hasil Quality Assurance Level 3/berkembang (2,80) pada tahun 2021 terealisasi dengan Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima tahun 2021 adalah Level 3/berkembang (2,40) atau

tercapai sebesar 85,71%. hal tersebut menunjukkan tercapainya target.

- 1.4 Sasaran Strategis Inspektorat meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B, target sebesar 93,10 % atau sebanyak 27 OPD dari Total 29 OPD (OPD yang di evaluasi karena adanya perubahan Struktur Organisasi sehingga yang diukur hanya pada OPD awal) dengan realisasi sebesar 100% atau OPD yang telah menerapkan SAKIP dengan Nilai Minimal B sebanyak 27 OPD atau dengan capaian sebesar 100 % dari target yang telah ditentukan.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada sasaran strategis pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta dengan indikator Kinerja pendukung Inspektorat Kota Bima, sebagai berikut :

- a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD

Perkembangan Opini BPK RI atas pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Bima 5 tahun terakhir dapat dilihat pada matriks berikut:

Tabel 15 : Perbandingan Realisasi dan capaian opini BPK

Tahun audit	Indikator Kinerja Opini BPK RI terhadap LKPD	
	Realisasi	Capaian
2011	Disclaimer	Disclaimer
2012	Disclaimer	Disclaimer

Tahun audit	Indikator Kinerja Opini BPK RI terhadap LKPD	
	Realisasi	Capaian
2013	WDP	WDP
2014	WTP	WTP
2015	WTP	WTP
2016	WTP	WTP
2017	WTP	WTP
2018	WTP	WTP
2019	WTP	WTP
2020	WTP	WTP

Dari tabel 15 diatas terlihat bahwa terjadi tren peningkatan status atas opini BPK RI dari tahun ke tahun dimana sampai dengan tahun 2020 status opini WTP.

b. Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai SAKIP

Peningkatan hasil evaluasi dari KEMENPAN-RB atas AKIP Pemerintah Kota Bima 5 tahun terakhir dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel 16 : Perbandingan Realisasi dan capaian Nilai SAKIP

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	4	6
2016	B	B	B
2017	BB	B	B
2018	BB	B	B
2019	B	B	B
2020	B	B	B

Dari tabel 16 diatas terlihat bahwa terjadi tren Peningkatan hasil evaluasi dari KEMENPAN-RB atas AKIP Pemerintah Kota Bima dimana sampai dengan tahun 2021 capaian hasil evaluasi dengan nilai SAKIP : B.

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Kota Bima sebagai salah satu unsur penunjangnya untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan Nilai SAKIP (B).

Adapun beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang serta gambaran perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Inspektorat Kota Bima dapat dijelaskan dibawah ini.

a. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

- 1). Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material.

Tabel 17 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material tahun 2017 dan 2021.

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4
2017	24,29%	39 OPD	95,12%
2018	36,59%	19 OPD	46,34%
2019	60,98%	26 OPD	63,41%
2020	85,37%	21 OPD	70,28%
2021	60,98%	28 OPD	68,29%

Sumber data temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material dari tahun 2017, 2018, 2019 sebagai base line data untuk tahun 2021, begitu dengan tahun – tahun berikutnya dengan kriteria atas beberapa materi kerugian antara lain : temuan : SPPD, Honorarium dan Belanja Modal. Dari tabel 17 diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertahun telah melebihi target yang ditentukan walaupun terjadi peningkatan temuan berulang mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Peningkatan temuan berulang tersebut terutama terjadi pada tahun 2019 dimana peningkatan terjadi secara signifikan yaitu sebesar 48,78% bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum.

- 2). Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK.

Tabel 18 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Porsentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK

TAHUN	JUMLAH TEMUAN				JUMLAH TINDAKLANJUT			REALISASI PERTAHUN	CAPAIAN PERTAHUN
	BPK	INSPEKTORAT	JUMLAH	PERSENTASE TARGET	BPK	INSPEKTORAT	JUMLAH		
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/5X100 %)
2019 LKPD 2018	11	21	32	90,00%	11	10	21	65,63%	72,92%
2020 LKPD 2019	12	22	34	90,00%	8	13	21	61,76%	100%
2021 LKPD 2020	22	42	64	90,00%	22	30	52	81,25%	90,28%

Dari tabel data sebagaimana tertera diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan porsentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Temuan tahun 2019 dijadikan baseline target yaitu sebanyak 34 temuan, adapun jumlah temuan APIP dan BPK tahun 2021 adalah sebanyak 32 temuan atau 90,00% dan tindaklanjut atas temuan tersebut terealisasi sebanyak 21 temuan atau 65,63% sehingga capaian akhir tahun 2021 sebesar 72,92%. Dari hasil data tersebut diatas menunjukkan adanya peningkatan pertahun.

- 3). Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima.

Tabel 19 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Level/Nilai hasil Quality Assurance

Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima.

Untuk data perbandingan tahun sebelumnya belum bisa disajikan disebabkan oleh sasaran dan indikator ini baru tertuang dalam renstra tahun 2018 sehingga data yang bisa disajikan hanya tahun 2018 dan 2021 dengan capaian hasil 85,71% atau telah mencapai target atau Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima tahun 2021 dengan Level/Nilai hasil Quality Assurance adalah berkembang (2,40).

- 4). Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B

Tabel 20 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Persentase OPD yang sudah

TAHUN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
	TINGKAT	ANGKA	TINGKAT	ANGKA	%
2020	Berkembang	2,80	Berkembang	2,35	83,93%
2021	Berkembang	2,80	Berkembang	2,40	85,71%

rapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B.

Dari uraian perkembangan persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B tahun 2017 dan 2021 menunjukkan bahwa penerapan SAKIP untuk OPD dilingkungan Pemerintah Kota Bima telah mencapai target pertahun. Hal tersebut tercermin dari capaian yang dihasilkan oleh OPD yang ditunjukkan dengan tingkat keberhasilan pemerintah daerah memperoleh hasil Indeks SAKIP dengan nilai baik untuk tahun 2021 penilaian tahun 2020.

5). **Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra.**

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah sasaran strategis pemerintah Kota Bima yang menjadi kewenangan Inspektorat Kota Bima yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima untuk menunjang sasaran Strategis serta indikator kinerja pemerintah Kota Bima dapat digambarkan dengan persentase capaian dari total target dalam rencana strategis. Gambaran capaian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja pemerintah Kota Bima yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Tabel 24: Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah Indikator Kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima	Indikator Kinerja	s/d Tahun 2020			Akhir Renstra 2020
		Target	Realisasi	Capaian	Target
2	3	4	5	6	7
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP

Dari realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 telah meraih WTP dari target yang ditentukan sampai dengan tahun 2021 yaitu WTP.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Kota Bima sebagai salah satu unsur

penunjangnya untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Adapun beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang serta gambaran Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah tahun 2021 dapat lihat pada matrik sebagai berikut.

1) Sasaran Strategis Inspektorat 1 : Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif , efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah Akhir Renstra 2021 dengan indikator Kinerja :

a) Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material

Tabel 25 : Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah tahun 2021

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2021			Tahun 2021
	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5
1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material	60,98%	76,00%	68,29%	60,98%

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 25 diatas menunjukkan bahwa dari jumlah OPD yang ditargetkan sebanyak 25 OPD atau sebesar 60,98% dari total sebanyak 41 OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang untuk tahun 2021 maka terealisasi sebanyak 28 OPD atau sebesar 76,00% dengan capaian sebesar 68,29%. hal tersebut menunjukkan tercapainya target.

- b) Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK

Tabel 26 : Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah tahun 2021

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2021			Tahun 2021
	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5
1. Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	90,00%	65,63%	72,92%	90,00%

penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 26 diatas menunjukkan bahwa dari Target sebesar 90,00% atau sebanyak 32 Temuan dari Total temuan tahun 2018 sebagai base line data sebanyak 34. Dari target tersebut tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK Tahun 2021 Terealisasi sebanyak 21 temuan atau 65.63% dari target 32 temuan atau dengan capaian sebesar 72,92% dari target yang ditentukan sebesar 90,00% atau belum tercapainya target yang diinginkan.

- c) Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima

Tabel 27 : Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah tahun 2021

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2021			Tahun 2021
	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5
1. Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	berkembang (2,80)	berkembang (2,40)	85,71 %	berkembang (2,80)

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 20 diatas menunjukkan bahwa dari Target Level/Nilai hasil Quality Assurance Level 3/berkembang (2,80) pada tahun 2021 terealisasi dengan Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima tahun 2021 adalah Level 3/berkembang (2,40) atau tercapai sebesar 85,71%. hal tersebut menunjukkan tercapainya target.

- d) Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B

Tabel 28 : Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah tahun 2021

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2021			Tahun 2021
	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5
1. Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B	93,10%	93,10%	100,00%	93,10%

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 21 diatas menunjukkan bahwa dari target sebesar 93,10 % atau sebanyak 27 OPD dari Total 29 OPD (OPD yang di evaluasi karena adanya perubahan Struktur Organisasi sehingga yang diukur hanya pada OPD awal) dengan realisasi sebesar 100% atau OPD yang telah menerapkan SAKIP dengan Nilai Minimal B sebanyak 27 OPD atau dengan capaian sebesar 100 % dari target yang telah ditentukan.

- b. Indikator Kinerja pemerintah Kota Bima yaitu Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai SAKIP.

Tabel 29: Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah Indikator Kinerja Indeks SAKIP/LKIP.

Sasaran Strategis pemerintah Kota Bima	Indikator Kinerja	s/d Tahun 2020			Tahun 2021
		Target	Realisasi	Capaian	Target
2	3	4	5	6	7
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	2 Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah /Nilai SAKIP	B	B	B	B

Untuk tahun 2020 capaian Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai SAKIP telah mencapai target.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Kota Bima sebagai salah satu unsur penunjangnya untuk mencapai Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditargetkan.

Adapun beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang serta gambaran Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah tahun 2021 dapat lihat pada matrik sebagai berikut.

2) Sasaran Strategis Inspektorat 2 : Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah Akhir Renstra 2021 dengan indikator Kinerja :

a). Level Kapabilitas APIP

Tabel 30 : Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah tahun 2021

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2021			Tahun 2021
	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5
2. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Level 3

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 30 diatas menunjukkan bahwa dari target Level 3 (2,80) atau berkembang. Hasil peningkatan kapabilitas menunjukkan realisasi sebesar 100 % atau terealisasi pada tingkat Level 3 (2,40) atau dari target Level 3 (2,80) dengan capaian sebesar 100 % (berkembang) dari target yang ditentukan atau sudah mencapai target.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Faktor Keberhasilan adalah faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi dan misi. Capaian Kinerja diartikan sebagai hasil yang diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi, capaian dan Target. Sehingga faktor keberhasilan capaian kinerja dapat disimpulkan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk meraih target-target yang telah ditetapkan, sehingga realisasi dari program kegiatan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas Inspektorat Kota Bima dapat memilah capaian kinerja menjadi 2 bagian yaitu indikator yang berhasil dalam capaian kinerja dan indikator yang belum berhasil dalam capaiannya dari sasaran kinerja Pemerintah Kota Bima yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sasaran serta indikator kinerja utama Inspektorat Kota Bima untuk menunjang sasaran kinerja serta indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima seperti dalam tabel berikut:

- a. Indikator Kinerja pemerintah Kota Bima yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD.

Tabel 32: Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI Terhadap LKPD tahun 2020.

No	Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	
I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI	WTP	WTP	WTP	Berhasil

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 32 diatas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Opini Badan Pemeriksa

Keuangan RI tahun anggaran 2018 pemeriksaan tahun 2020 telah berhasil mencapai target.

Berikut ini dapat dijelaskan faktor keberhasilan dari indikator kinerja ini :

Sebagai tolak ukur capaian kinerja tahun 2021 atas Opini BPK RI diambil dari hasil opini BPK RI tahun anggaran 2018. Adapun gambaran Opini yang dicapai selama 5 tahun seperti yang tertuang dalam **tabel 15**. Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Kota Bima belum mampu menerapkan Prinsip akuntansi dalam laporan keuangan secara konsisten sehingga belum bisa keluar dari opini disclaimer. Pada tahun 2012 dan 2013 Pemerintah Kota Bima mulai melakukan perubahan berupa perbaikan terhadap penerapan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan opini dari disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian. Upaya perbaikan terhadap penerapan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh pemerintah daerah terutama atas pengelolaan aset daerah, sampai akhirnya pada tahun 2014,2015,2016,2017,2018 dan 2021 Pemerintah Kota Bima meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari dukungan beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang Inspektorat Kota Bima. Adapun gambaran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Inspektorat Kota Bima tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 33 : Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja utama Inspektorat Kota Bima dalam mendukung indikator utama pemerintah Kota Bima yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material	60,98%	76,00%	68,29%	Berhasil
		2. Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	90,00%	65,63%	72,92%	Belum Berhasil
		3. Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	berkembang (2,80)	berkembang (2,40)	berkembang	Berhasil
		4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B	93,10%	93,10%	100%	Berhasil

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 33 diatas dapat dijelaskan faktor –faktor keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target dari indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Bima sebagai berikut :

1) Analisis Keberhasilan dan kegagalan indikator kinerja utama dari sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.1. *Indikator kinerja persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material.*

Sebagaimana telah dijelaskan dalam tabel perbandingan diatas, baik perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada tahun 2021 maupun perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya dan target tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa Sumber data temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material dari tahun 2011,2012,2013 sebagai base line data untuk tahun 2014,begitu dengan tahun – tahun berikutnya dengan kriteria atas beberapa materi kerugian antara lain : temuan : SPPD, Honorarium dan Belanja Modal. Dari tabel 9 diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertahun telah melebihi target yang ditentukan walaupun terjadi peningkatan temuan berulang mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Peningkatan temuan berulang tersebut terutama terjadi pada tahun 2019 dimana peningkatan terjadi secara signifikan yaitu sebesar 48,78% bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2019 terjadi penurunan kembali bila dibandingkan dengan tahun 2018 terhadap OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang yaitu pada tahun 2016 capaian 46,34% dari target 36,59% sedangkan pada tahun 2017 capaian 63,41% dari target sebesar 60,98% atau penurunan atas OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang sebesar 17,07%, namun pada tahun 2018 terjadi peningkatan kembali dari target sebesar 85,37% terealisasi 60,00% atau capaian sebesar 70,29%. Demikian halnya pada tahun 2021 terjadi peningkatan dari target 60,98% , dari target tersebut maka terealisasi sebanyak 28 OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang atau sebesar 76,00% atau dengan capaian sebesar 68,29%. Keberhasilan pelampauan dari

target tersebut tidak terlepas dari peran Inspektorat Kota Bima dalam melakukan quality assurance berupa melakukan fungsi konsultasi dengan OPD baik mulai perencanaan sampai dengan peng-SPJ-an yang disebabkan oleh tersedianya anggaran khusus atas fungsi asistensi, disamping hal tersebut penyebab lainnya adalah Koordinasi dan komunikasi antara Auditi dan Auditor, kompetensi pengelola keuangan OPD, kompetensi pemeriksa dalam pengembangan temuan, integritas dan etika aparatur pengelola keuangan, serta adanya perubahan pola pemeriksaan pada objek pemeriksaan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dan pemanfaatan anggaran, adanya perubahan peraturan – peraturan yang diikuti dengan pembuatan dan kepatuhan atas regulasi tersebut.

1.2. *Indikator Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK*

Komitmen pemerintah daerah akan peran dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bima dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan dilihat dari komitmen pimpinan, komitmen pegawai sekaligus tim teknis TLHP dalam mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas jalannya organisasi dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bima. Keberhasilan dari peran dan tugas yang diemban oleh Inspektorat (internal auditor) salah satunya ditunjukkan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Banyaknya temuan audit yang belum ditindaklanjuti merupakan tanggung jawab bagi auditi untuk penyelesaiannya dengan tetap dimonitor oleh APIP. Penyelesaian TLHP yang merupakan perwujudan kinerja Inspektorat Daerah Kota Bima tercermin dalam data pemantauan

tindak lanjut tahun 2017 sampai dengan bulan Desember TA 2021. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi sebanyak 94 rekomendasi atau 72,31 % dari 130 rekomendasi, tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan belum ditindaklanjuti sebanyak 36 rekomendasi atau sebesar 8.63 %, serta rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi atau sebesar 0 %. Jika dilihat *progress* TLHP tahun 2021 sebanyak 21 rekomendasi atau 65,63 % dari target sebanyak 32 rekomendasi atau 90,00% dengan capaian sebesar 72,92% ini mengalami peningkatan walaupun belum mencapai target yang ditentukan. Upaya tindak lanjut belum maksimal dilakukan, terlihat masih adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, dan keterlambatan penyelesaian tindak lanjut (tidak tepat waktu) serta respon pejabat yang diperiksa atau pejabat yang bertanggung jawab dalam hal tindak lanjut masih kurang. Dari gambaran tersebut diatas dapat dikatakan belum optimalnya dukungan/keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan TLHP sebagai wujud akuntabilitas.

1.3. *indikator Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima*

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern adalah tingkat kematangan / kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi atau Pengendalian telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara efektif dalam

rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sesuai dengan pedoman BPKP, merincikan level maturitas SPIP menjadi enam tingkatan sebagai berikut:

Level	Keterangan	Interval Skor
Belum ada	Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian intern.	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)
Rintisan	Praktik pengendalian intern bersifat ad hoc dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan.	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
Berkembang	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektivitasnya.	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
Terdefinisi	Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai.	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
Terkelola dan terukur	Pengendalian intern diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi.	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
Optimum	Pengendalian intern diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis.	Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Pada tahun 2021 indikator Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima. Dari Target Level/Nilai hasil Quality Assurance *berkembang* (2,80) terealisasi *berkembang* (2,40) atau tercapai sebesar 85,71%. hal tersebut menunjukkan tercapainya target.

Keberhasilan pencapaian target ini lebih disebabkan oleh beberapa faktor baik internal OPD maupun dari Inspektorat sendiri. Salah satu fungsi Inspektorat Kota Bima adalah melakukan koordinasi dan pembinaan terkait dengan penyelenggaraan SPIP dimana

didalamnya terdapat lingkungan pengendalian sebagai salah satu unsur SPIP. beberapa faktor internal OPD antara lain tersedia petunjuk teknis dan atau Standar operasional prosedur atas program dan kegiatan, semakin membaiknya penerapan dari Standar operasional prosedur atas program dan kegiatan yang telah ada, semakin menguatnya penerapan penegakan integritas dan nilai etika, semakin kuatnya komitmen pada kompetensi terlebih pada tahun 2021 atas penyelenggaraan SPIP sehingga berpengaruh pada tercapainya indikator kinerja ini.

1.4. *Indikator Porsentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B.*

Indikator ini berguna untuk dapat mengukur sejauhmana OPD telah pertanggungjawaban kinerjanya pertahun sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi OPD. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 penerapan SAKIP oleh OPD telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik hal tersebut tercermin dengan telah tercapainya target yang ditentukan dalam pengukuran persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B dimana pada 2014 capaian untuk indikator ini sebanyak 18 OPD atau 62,07 % dari total OPD dengan realisasi sebesar 100% atau tercapai 62,07 % demikian pula pada tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 capaian tersebut mampu dipertahankan sebesar target keberhasilan yang ditentukan dengan realisasi 93,10% OPD atau capaian sebesar 100,00,% dengan target 27 OPD dari total sebanyak 29 OPD

dengan rata capaian dengan nilai B. Keberhasilan capaian kinerja ini tentunya tidak terlepas dari peran seluruh unsur untuk menciptakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dijelaskan atas capaian kinerja pemerintah daerah yang telah memenuhi target yang telah ditentukan diatas hal tersebut antara lain karena membaiknya perencanaan kinerja baik yang dilakukan oleh bappeda, Inspektorat maupun OPD terkait melalui pola asistensi, koordinasi, dan pembinaan serta reviu atas dokumen perencanaan sehingga dapat menyajikan tujuan, sasaran, indikator dan target - target yang dapat diukur, baik dalam dokumen RPJMD, Renstra, renja sampai dengan dokumen pelaksanaan anggaran, dengan mulai membaiknya perencanaan tentunya berpengaruh terhadap membaiknya pemenuhan, dan pemanfaatan laporan kinerja yang lebih terarah sehingga program dan kegiatan serta penyerapan yang menunjang sasaran dan indikator kinerja dapat diukur, dengan demikian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya OPD dapat dipertanggung jawabkan.

- b. Indikator Kinerja pemerintah Kota Bima yaitu Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai SAKIP.

Tabel 34: Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai SAKIP.

No	Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	
I	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2 Nilai SAKIP	B	B	B	berhasil

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 34 diatas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Indeks SAKIP/ Nilai SAKIP, pengukurannya didasarkan pada capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2018, hal ini disebabkan oleh hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 dilakukan pada bulan sembilan tahun 2020 sehingga kinerja yang diukur adalah kinerja tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil pengukuran tersebut terlihat bahwa Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai SAKIP telah mencapai target yang telah ditentukan.

Berikut ini dapat dijelaskan faktor berhasilnya dari indikator kinerja ini :

Indikator sasaran ini diarahkan untuk mendukung penginformasian pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah pertahunnya. Sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi pemerintah yang merupakan salah satu pilar terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Gambaran peningkatan capaian Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai SAKIP selama 3 tahun terakhir seperti yang tertuang dalam tabel 16 diatas tidak terlepas dari mulai penerapan SAKIP belum sepenuhnya menggambarkan efektifitas penggunaan anggaran bila dikaitkan dengan kinerja yang diharapkan terutama terkait dengan definisi kinerja pada perumusan sasaran strategis, kualitas indikator kinerja serta kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pencapaian target kinerja pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari dukungan beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang Inspektorat Kota Bima. Adapun gambaran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Inspektorat Kota Bima tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 35 : Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja utama Inspektorat Kota Bima dalam mendukung indikator utama pemerintah Kota Bima yaitu Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai SAKIP.

2). Analisis Keberhasilan dan kegagalan indikator kinerja utama dari sasaran strategis Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2.1. *Level Kapabilitas APIP.*

Salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur efektivitas peran unit audit intern di sektor publik adalah model penilaian yang disebut Internal Audit Capability Model (IA-CM) atau model kapabilitas audit intern. Kapabilitas audit intern umumnya terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks.

Level kapabilitas unit audit intern adalah sebagai berikut : (1) initial; (2) infrastructure; (3) integrated; (4) managed; dan (5) optimizing. Setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit intern pada level tersebut. Dengan meningkatnya ukuran atau kompleksitas organisasi atau risiko terkait dengan kegiatan, maka membutuhkan kapabilitas audit intern yang lebih baik lagi. Pada masing-masing level kapabilitas di atas terdapat enam elemen audit intern, yaitu (1) peran dan layanan audit intern, (2) manajemen SDM, (3) praktik profesional, (4) manajemen kinerja dan akuntabilitas, (5) hubungan dan budaya organisasi, dan (6) struktur tata kelola. Elemen (1) sampai dengan (4) merupakan area peningkatan yang sepenuhnya bergantung pada upaya dari aktivitas audit intern sendiri untuk mewujudkannya. Sedangkan elemen (5) dan (6) juga mencakup hubungan aktivitas audit intern dengan organisasi

yang didukungnya serta dengan lingkungan internal dan eksternal.

Pada tahun 2021 indikator Level Kapabilitas APIP target Level 3 atau berkembang, hasil peningkatan kapabilitas menunjukkan realisasi sebesar 100 % atau terealisasi pada tingkat Level 3 (berkembang) atau dari target Level 3 (berkembang) dengan capaian sebesar 100 % (berkembang) dari target yang ditentukan atau sudah mencapai target.

Keberhasilan capaian kinerja ini tentunya tidak terlepas dari peran seluruh unsur, serta terpenuhinya standar level kapabilitas sesuai dengan karakteristik dan kapabilitas unit audit intern yaitu

- Kebijakan, proses, dan prosedur audit intern telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi.
- Manajemen serta praktik profesional unit audit intern telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan audit intern.
- Unit audit intern mulai menyelaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi organisasi.
- Unit audit intern berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko.
- Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan audit intern, independensi serta objektivitas.
- Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan standar audit.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Analisis **efisiensi** dilakukan dengan membandingkan antara outcome atau output penting dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian outcome atau output penting yang lebih besar dari realisasi keuangan dan atau capaian input mencapai di atas 100,00% menunjukkan bahwa sasaran strategis yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan **efisien**. Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian outcome atau output penting lebih kecil dari pada realisasi keuangan menunjukkan bahwa sasaran strategis yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan **inefisien**. Sedangkan apabila terjadi capaian outcome atau output penting yang dilaksanakan oleh satuan kerja sama dengan realisasi keuangan menunjukkan bahwa sasaran strategis yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan **sesuai harapan**.

a. Analisis Efisiensi Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima yang menjadi kewenangan Inspektorat Kota Bima.

Analisis efisiensi sumber daya dilakukan hanya dengan menggunakan perbandingan dengan nilai Input atau Anggaran yang digunakan. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana dimaksud dapat di ketahui dari capaian kinerja sasaran strategis pemerintah Kota Bima dengan penyerapan anggaran yang digunakan pada tahun 2021 sebagai mana tabel dibawah ini :

Tabel 36. Analisis efisiensi

NO	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA REALISASI/CAPAIAN KINERJA SASARAN	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	92,69%	93,40%	0,71%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran strategis pemerintah Kota Bima yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD bersifat kualitatif, dan indikator kinerja Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/Nilai SAKIP bersifat kuantitatif.

Untuk pengukuran indikator kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD pengukurannya dengan menggunakan konversi pada atribut indikator kinerja pendukung OPD dalam hal ini Inspektorat Kota Bima yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja sebagai alat ukur perhitungan rata-ratanya. Sedangkan untuk pengukuran Indikator Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/Nilai SAKIP pengukurannya dengan menggunakan atribut indikator kinerja Inspektorat Kota Bima yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dan perhitungannya menggunakan 2 (dua) indikator kinerja sebagai alat ukur perhitungan rata-ratanya. Adapun gambaran dari sasaran dan indikator kinerja pendukung Inspektorat Kota Bima dapat dilihat pada poin b dibawah ini.

- b. Analisis Efisiensi Sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima sebagai pendukung sasaran strategis Pemerintah Kota Bima.
Analisis efisiensi sumber daya dilakukan hanya dengan menggunakan perbandingan dengan nilai Input atau Anggaran yang digunakan. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana dimaksud dapat di ketahui dari capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Bima dengan penyerapan anggaran yang digunakan pada tahun 2021 sebagai mana tabel dibawah ini :

Tabel 37. Analisis efisiensi

No	Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Capaian	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan	70,95 %	85,38%	98,36%	27,41 % Efisien

No	Sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Capaian	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material	76,00%	68,29%	97,09%	21,09 Efisien
		2. Persentase tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	65,63 %	72,92 %	99,52%	-33,89% In Efisien
		3 Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	Berkembang (2,40)	100%	99,57%	Efisien

No	Sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Capaian	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8
		4 Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B	93,10%	100,00%	96,48%	3,38% Efisien

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA						
Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Capaian	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	
1	2	3	5	6	7	8
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/Nilai SAKIP	90,00%	100,00%	98,16%	8,16% Efisien

5. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dianalisa dengan menggunakan analisis *efektivitas* dengan membandingkan antara input dengan output baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian outcome yang lebih besar dari pada realisasi keuangan dan atau capaian output mencapai diatas 100,00% menunjukkan bahwa program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *efektif*. Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian output lebih kecil dari pada realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *inefektif*. Sedangkan apabila terjadi capaian output

sama dengan realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan ***sesuai harapan***.

Efektifitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Pengukuran efektifitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *output/outcome, benefit dan impact* dari kegiatan yang bersangkutan. Efektifitas kegiatan dibagi atas dua macam, yaitu : (a) efektifitas individual kegiatan; (b) efektifitas terkait dengan pencapaian sasaran.

Adapun gambaran analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja dilihat dari sisi efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Selama tahun 2021, Inspektorat Kota Bima melaksanakan 3 (tiga) program strategis. Berdasarkan hasil pengukuran kinerjanya diperoleh gambaran bahwa sebanyak 15 (lima belas) kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, dan 7 (tujuh) kegiatan tidak efektif.

Belum efektifnya pelaksanaan program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP Meningkat, lebih disebabkan oleh Minimnya perangkat daerah yang diusulkan sebagai WBK/WBBM di lingkungan Pemerintah Kota Bima. Demikian juga dengan program pembinaan dan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP Meningkat belum efektif pelaksanaannya disebabkan oleh Perubahan sistem maupun kebijakan dalam pengelolaan anggaran yang akan merubah alur proses kerja yang sudah direncanakan awal perencanaan sehingga OPD perlu menyesuaikan kembali dengan kebijakan yang berlaku.

Selain program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang belum efektif,terdapat juga program dan kegiatan yang belum efektif berjalan yaitu Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dimana yang menjadi indikator kinerjanya adalah Persentase menurunnya temuan APIP dan BPK belum mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain masih rendahnya keseriusan OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi Temuan APIP dan BPK, kurangnya kooperatif dari penanggungjawab atas rekomendasi temuan, penanggungjawab / yang bersangkutan meninggal dunia, tindak lanjut belum secara tuntas dan nyata hanya sebagian – sebagian secara menyicil atau bertahap.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2021 total pagu anggaran Inspektorat Kota Bima untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang dibiayai dengan dana APBD sebesar Rp. 7.399.431.556,00,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 7.341.721.190,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratur Sembilan Puluh Rupiah), atau 99,22%. (Sembilan Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Dua Persen).

Berikut ini akan disajikan besaran anggaran, capaian realisasi anggaran pada masing- masing program kegiatan.

Tabel 39 : Capaian realisasi anggaran program/kegiatan

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
Program/Keg Daerah Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	7.423.000,00	7.377.000,00	46.000,00	99,38
Program/Keg Daerah Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
	3.485.000,00	3.466.000,00	19.000,00	99,45

Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					99,88
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
PER KEGIATAN	JUMLAH	6.543.000,00	6.535.000,00	8.000,00	
Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					99,80
Kegiatan Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
PER KEGIATAN	JUMLAH	3.489.900,00	3.483.000,00	6.900,00	
Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					99,71
Kegiatan n Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
		5.860.800,00	5.844.000,00	16.800,00	
Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					99,78
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		3.440.600,00	3.433.200,00	7.400,00	
Program : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					99,99
Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		15.028.500,00	15.026.500,00	2.000,00	
Program : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					99,16
Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		5.672.431.456,00	5.624.892.757,00	47.538.699,00	
Program : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					99,93
Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
		24.456.000,00	24.440.000,00	16.000,00	
Program : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					99,97
Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		93.660.000,00	93.634.000,00	26.000,00	
Program : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					99,79
Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
		7.120.000,00	7.105.000,00	15.000,00	
Program : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					

	6.276.800,00	6.266.000,00	10.800,00	99,83	
Program : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan					
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
PER KEGIATAN	JUMLAH	3.428.800,00	3.374.000,00	54.800,00	98,40
Program : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
	1.775.600,00	1.772.000,00	3.600,00	99,80	
Program : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					
	730.000,00	730.000,00	0,00	100,00	
Program : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					
	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
Program : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					
	6.847.200,00	6.842.000,00	5.200,00	99,92	
Program : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
	6.861.400,00	6.843.000,00	18.400,00	99,73	
Program : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					
	3.205.800,00	3.205.800,00	0,00	100,00	
Program : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
	60.873.000,00	59.383.300,00	1.489.700,00	97,55	
Program : Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	0,00	0,00	0,00		

Program : Administrasi Umum Perangkat Daerah					99,88
Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		28.634.400,00	28.600.000,00	34.400,00	
Program : Administrasi Umum Perangkat Daerah					98,72
Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
		7.051.000,00	6.961.000,00	90.000,00	
Program : Administrasi Umum Perangkat Daerah					99,67
Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		19.852.000,00	19.786.000,00	66.000,00	
Program : Administrasi Umum Perangkat Daerah					99,97
Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
PER KEGIATAN	JUMLAH	359.657.400,00	359.555.372,00	102.028,00	
Program : Administrasi Umum Perangkat Daerah					99,81
Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
PER KEGIATAN	JUMLAH	10.961.000,00	10.940.000,00	21.000,00	
Program : Administrasi Umum Perangkat Daerah					100,00
Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
PER KEGIATAN	JUMLAH	17.237.400,00	17.237.400,00	0,00	
Program : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					98,72
Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
PER KEGIATAN	JUMLAH	139.180.000,00	137.404.500,00	1.775.500,00	
Program : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					99,73
Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
PER KEGIATAN	JUMLAH	28.820.400,00	28.743.250,00	77.150,00	
Program : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					99,96
Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		24.707.000,00	24.698.000,00	9.000,00	
Program : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					96,35
Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		102.600.000,00	98.850.000,00	3.750.000,00	

Program : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	27.162.500,00	25.894.862,00	1.267.638,00	95,33
Program : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	8.680.000,00	8.660.000,00	20.000,00	99,77
Program : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	13.810.600,00	13.582.650,00	227.950,00	98,35
Program : Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				
	228.609.800,00	228.423.599,00	186.201,00	99,92
Program : Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				
	11.636.000,00	11.628.000,00	8.000,00	99,93
Program : Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja				
	147.663.400,00	147.458.000,00	205.400,00	99,86
Program : Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kegiatan : Reviu Laporan Keuangan				
	20.228.600,00	19.773.000,00	455.600,00	97,75
Program : Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kegiatan : Kerjasama Pengawasan Internal				
	27.524.200,00	27.520.000,00	4.200,00	99,98
Program : Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				
	149.810.000,00	149.770.000,00	40.000,00	99,97
Program : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				

	2.528.000,00	2.528.000,00	0,00	100,00
Program : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				
Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				
	50.492.000,00	50.452.000,00	40.000,00	99,92
Program : Pendampingan dan Asistensi				
Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				
	15.566.600,00	15.543.000,00	23.600,00	99,85
Program : Pendampingan dan Asistensi				
Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				
	11.591.600,00	11.585.000,00	6.600,00	99,94
Program : Pendampingan dan Asistensi				
Kegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				
	8.690.800,00	8.675.000,00	15.800,00	99,82

Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim, dan pertanggung jawabannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Bima tahun 2021 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Inspektorat Kota Bima berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga dimaksudkan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Dalam tahun 2021 sesuai dengan kewenangannya Inspektorat Kota Bima menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran pemerintah Kota Bima dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sedangkan sasaran strategis Inspektorat Kota Bima sebagai pendukung sasaran dan indikator kinerja Pemerintah Kota Bima telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja.

Adapun Pencapaian Sasaran Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Sasaran strategis Inspektorat Kota Bima sebagai sasaran pendukung sasaran pemerintah Kota Bima. Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan terdapat 1 (satu) sasaran telah mencapai target dengan nilai rata-rata sebesar 58,97%. Dari rata-rata target sebesar 50,00% Sedangkan 1 (satu) sasaran belum mencapai target dengan nilai rata-rata target sebesar 81,36% dengan rata-rata capaian sebesar 78,24% Adapun faktor penyebab dari permasalahan belum tercapainya target adalah :

- a. Masih rendahnya capaian kinerja tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang disebabkan oleh
 1. Kurangnya kooperatif/keseriusan Penanggungjawab untuk menindaklanjuti rekomendasi Temuan APIP dan BPK baik yang bersifat administratif maupun material;
 2. Tindak lanjut rekomendasi yang bersifat material belum secara tuntas dan nyata hanya sebagian-sebagian secara menyicil atau bertahap,

3. Belum optimalnya waktu pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil temuan.

B. SARAN

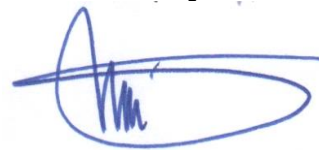
Strategi pemecahan atau langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan adalah :

- a. Peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK melalui langkah-langkah sebagai berikut
 1. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang teknik tindak lanjut yang baik dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses tindak lanjut;
 2. Mengoptimalkan penerapan punishment/sanksi terhadap OPD/penanggung jawab yang tidak serius menindaklanjuti rekomendasi temuan;
 3. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut diupayakan lebih optimal lagi, paling sedikit dua kali setahun.

Demikian LKIP ini dibuat, guna perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang.

Raba – Bima, Februari 2022

Inspektur,



Muhaimin, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620217 199003 1 010